GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Suara Pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**05 November 2007**
Subyek	**:**	**Pembalakan Liar**	**Hari**	**:**	**Senin**
			Halaman	**:**	**03**

Marak, Pembalakan Liar di Perbatasan RI-Malaysia

[PONTIANAK] Kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) di daerah perbatasan antara Indonesia (Kalimantan Barat) dengan Malaysia sampai saat ini masih marak.

Upaya pengawasan dan penertiban pun sangat sulit dilakukan karena lokasi yang jauh dan susah dijangkau aparat. Demikian Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan barat (Kalbar) Soenarno kepada *SP* akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, sebenarnya aktivitas pembalakan liar itu sudah menurun. Namun di daerah perbatasan, kegiatan yang telah menghancurkan hutan Indonesia itu masih tetap marak. Untuk mengawasi dan menertibkannya sangat sulit dilakukan. Karena lokasinya yang jauh dan sulit dijangkau, juga keterbatasan anggaran dan petugas keamanan.

Selama ini ada Pleton Lintas Batas (Ton Libas) yang mengawasi hutan di kawasan perbatasan, tetapi karena jumlah personelnya sangat terbatas, maka upaya menjaga hutan selalu gagal. Apalagi wilayah yang diawasi sangat luas yaitu mulai dari daerah Kabupaten Sambas hingga ke Kabupaten Kapuashulu.

Menurut data, sekarang ini kayu yang diselundupkan ke Malaysia tidak lagi dalam bentuk olahan tetapi *log* atau kayu bulat. Pekerja pembalakan liar masih tetap orang Indonesia dengan cukongnya adalah warga Malaysia.

Pemprov Kalbar dengan berbagai cara berusaha menghentikan kegiatan pembalakan liar oleh cukong asing itu. Tapi persoalannya selalu terbentur pada masalah dana. Pernah diupayakan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembalakan liar melalui satelit terutama untuk daerah Kabupaten Kapuashulu, Sintang dan Sambas. Tapi lagi-lagi gagal karena dana yang diperlukan sangat besar sementara anggaran yang dimiliki sangat minim.

Pemprov Kalbar kemudian mencari alternatif yakni menggunakan helikopter sehingga titik lokasi pembalakan liar dijangkau dengan cepat. Sayang kita tak punya dana. Melihat fakta tersebut, Pemprov Kalbar meminta pemerintah pusat agar menganggarkan atau menambah anggaran untuk penyewaan atau pengadaan helikopter.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Soenarno mengatakan, selama ini, jika hendak melakukan penertiban ke lokasi pembalakan liar di tengah hutan rimba, pihaknya selalu masuk melalui wilayah Malaysia. Hal ini mengakibatkan operasi penertiban selalu gagal, karena cukong Malaysia sudah mengetahui terlebih dahulu rencana operasi tersebut. "Jika operasi menggunakan helikopter, maka mereka sulit mengetahui dan aparat dapat dengan mudah mencapai lokasi," katanya. [146]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP